



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(L P P D)**

**KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebagai sub sistem pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2020, maka Pemerintahan Kecamatan Hatungun mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, dimana secara konstitusional telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kecamatan Hatungun. Dengan dukungan segenap pihak yang telah berkenan untuk membantu dengan memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini segera dapat diselesaikan. Untuk itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Hatungun Tahun 2020 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan untuk penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Hatungun di masa yang akan datang dengan harapan semoga kemajuan dan kemakmuran Hatungun tercinta dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.

CAMAT HATUNGUN

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM

NIP. 19770110 199903 1 004

DAFTAR ISI

DATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
a. Dasar Pembentukan SKPD.....	1
b. Jumlah ASN di SKPD	2
c. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD	6
1.1.2. Perencanaan Pembangunan.....	10
a. Permasalahan Strategis SKPD	10
b. Visi dan Misi SKPD.....	11
c. Program Pembangunan Daerah.....	13
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Renja	20
1.1.3. Penarapan Pelayanan Standar Minimal.....	27
BAB II CAPAIAN KINERJA SKPD	29
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	29
2.1.1. Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	29
1. Urusan Fungsi Penunjang.....	29
2. Indikator Kinerja Kunci	30
3. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	32
4. Sumber Data	32
2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.....	32
a. Target Dalam Perjanjian Kinerja	33
b. Pengukuran Capaian Kinerja	34
c. Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya	35
d. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Renstra	36
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	38
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target...	41

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN.....	42
	1. Dasar Hukum	42
	2. Instansi Pemberian Tugas Pembantuan.....	42
	3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan.....	42
	4. Program dan Kegiatan	43
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan.....	43
	6. Permasalahan Program dan Kegiatan serta Solusi	43
BAB III	PENUTUP	45
	3.1. Kesimpulan	45
	3.2. Saran-Saran	45
Lampiran :		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Dasar Pembentukan SKPD Kecamatan Hatungun

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Hatungun Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Berdasarkan undang-undang inilah maka pada tanggal 30 Nopember 1965 Kabupaten Tapin memisahkan diri dari wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadikan Kota Rantau sebagai ibukota kabupaten. Dengan terbentuknya Kabupaten Tapin, maka Kecamatan Hatungun merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.

Kantor Kecamatan Hatungun adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk

berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin* yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sehingga dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Hatungun Tahun Anggaran 2020 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, diantaranya adalah:

1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mengenai Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

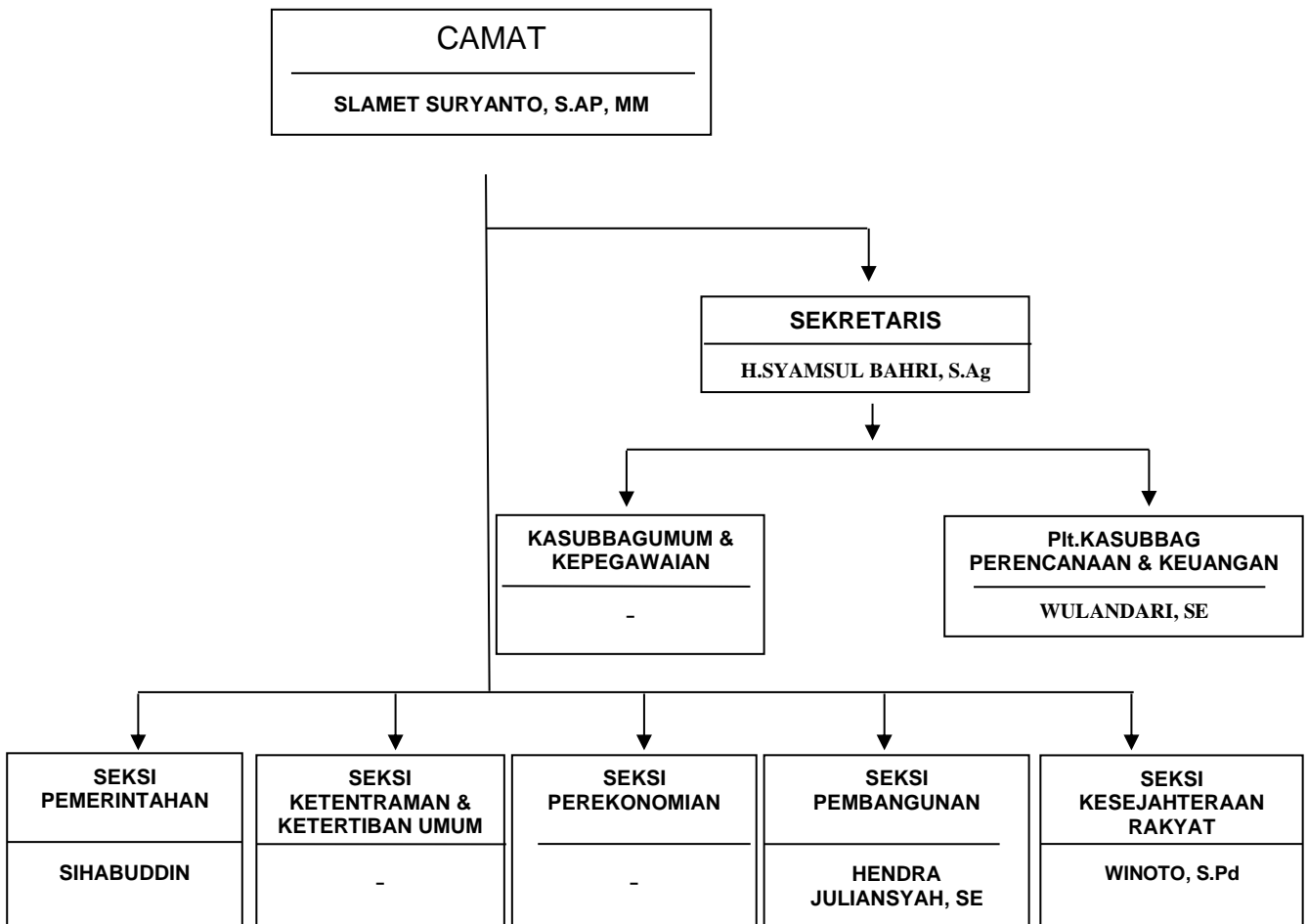
b. Jumlah ASN di SKPD

Jumlah pegawai Kecamatan hatungun sebanyak 11 orang. Sedangkan menurut kepangkatan dan golongan tertinggi Pembina (IV/a) dan yang terendah

adalah Pengatu (II/c). Bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan tertinggi PNS Kecamatan Hatungun adalah S2 dan terendah adalah SLTA sederajat.

No	NAMA	NIP	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Jabatan	Keterangan
1	SLAMET SURYANTO, S.AP,MM.	19770110 199903 1 004	S2	Pembina	Camat	Struktural
2	H.SYAMSUL BAHRI,S.AG	19680603 200312 1 002	S1	Penata TK.I	Sekcam	Struktural
3	SIHABUDDIN	19660319 198601 1 001	SMA	Penata TK.I	Kasi Pemerintahan	Struktural
4	WINOTO,S.PD	19650514 199003 1 012	S1	Penata TK.I	Kasi Kesra	Struktural
5	HENDRA JULIANSYAH, SE	19850721 201101 1 007	S1	Penata	Kasi Pembangunan	Struktural
6	WULANDARI, SE	19840709 201803 2 004	S1	Penata Muda	Verifikator Keuangan	Fungsional Umum
7	MUJI ANAN	19810903 201001 1 009	SMK	Pengatur	Bendahara Pengeluaran	Fungsional Umum
8	SUKARMAN	19630203 200701 1 018	STM	Pengatur Tk.I	Pengelola Binbangko	Fungsional Umum
9	MARDIONO	19651212 200906 1 001	SMA	Pengatur	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum
10	EDY SUBIANTO	19781207 200906 1 001	STM	Pengatur	Pengelola Program dan Kegiatan	Fungsional Umum
11	JAHRI FADLI	19820624 201001 1 007	MAN	Pengatur	Pengadministrasi Pemerintahan	Fungsional Umum

Adapun struktur organisasi SKPD Kecamatan Hatungun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Hatungun adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah $\pm 123,98 \text{ Km}^2$ dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh $\pm 38 \text{ Km}$. dan $\pm 95 \text{ Km}$ dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).

Kecamatan Hatungun berada pada ketinggian 230 sampai dengan 300 meter diatas permukaan laut dan terletak antara $2^{\circ}32'43'' - 3^{\circ}00'43''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}46'13'' - 115^{\circ}30'33''$ Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tapin Selatan dan Kabupaten Banjar
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Banjar
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Binuang
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Kecamatan Hatungun yang memiliki luas wilayah $123,98 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 8 desa, yaitu :

1. Desa Hatungun
2. Desa Kembang Kuning
3. Desa Tarungin
4. Desa Batu Hapu
5. Desa Asam Randah
6. Desa Burakai
7. Desa Matang Batas
8. Desa Bagak

1. Gambaran Umum Demografis

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) kabupaten Tapin Tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Hatungun adalah 9.463 jiwa, yang terdiri dari 4.730 jiwa penduduk laki-laki dan 4.733 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya, penduduk Kecamatan Hatungun berdasarkan jenis kelamin tiap desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 1
Penduduk Kecamatan Hatungun Menurut Jenis Kelamin
Tiap Desa Semerter I Tahun 2020

No	D e s a	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tarungin	440	449	889
2	Matang Batas	449	462	911
3	Hatungun	1.090	1.052	2.142
4	Burakai	324	337	661
5	Batu Hapu	966	964	1.930
6	Kambang Kuning	435	465	900
7	Asam Randah	442	419	861
8	Bagak	584	585	1.169
Jumlah		4.730	4.733	9.463

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tapin

Sedangkan perkembangan rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Hatungun pada Tahun 2020 adalah perbandingan antara luas wilayah Kecamatan Hatungun dengan jumlah penduduk tahun 2020, dengan kepadatan penduduk 71,25 orang per Km².

c. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Hatungun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Hatungun , dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan pagu belanja sebesar Rp. 2.358.565.254,-, yang bersumber dari

APBD dengan realisasi sebesar Rp. 1.944.258.322,- dengan persentase sebesar 82,43 %.

Secara garis besar, capaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan serta non program dan non kegiatan pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jumlah Anggaran Belanja Rp. 2.358.565.254,00 terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.819.827.318,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 439.937.936,00
 - c. Belanja Modal Rp. 98.800.000,00
- Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.944.258.322,00 terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.418.865.077,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 426.593.245,00
 - c. Belanja Modal Rp. 98.800.000,00

Hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja Tidak Langsung (non program non kegiatan) adalah sebagai berikut :

1. Dapat melaksanakan pembayaran Gaji Pegawai; dan
2. Dapat melaksanakan pembayaran Tunjangan Pegawai, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, dan tunjangan lainnya.
3. Dapat dilaksanakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai meliputi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan berdasarkan prestasi kerja;

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Hatungun, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) memuat semua anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara Langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Non Program dan Non Kegiatan). Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar, capaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan serta non program dan non kegiatan pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat digambarkan dalam Rekapitulasi Plafon Anggaran dan Realisasi serta persentasinya Tahun 2020 sebagai berikut :

**REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN & PERSENTASE
SKPD KECAMATAN HATUNGUN
TAHUN 2020**

No.	PROGRAM KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.987.936	257.832.162	99,17
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	10.006.416	9.421.798	94,16
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.000.000	28.000.000	100,00
4	Penyediaan Alat Tulis kantor	20.181.520	20.180.708	100,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000	6.750.000	96,43
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	5.000.000	5.000.000	100,00
7	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000	44.913.636	99,81
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	104.000.000	102.766.020	98,81
9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
10	Penyediaan Jasa e-KTP	24.000.000	24.000.000	100,00
11	Penyediaan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	3.000.000	3.000.000	100,00

II.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	214.300.000	206.361.083	96,30
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	37.000.000	36.999.273	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	67.000.000	65.561.810	97,85
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.800.000	98.800.000	100,00
4	Sertifikasi Tanah	6.500.000	0	0

5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
---	---	-----------	-----------	--------

III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.450.000	5.450.000	100,00
1.	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja / Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.250.000	3.250.000	100,00
2.	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	2.200.000	2.200.000	100,00

IV.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	17.000.000	17.000.000	100,00
1.	Musrenbang kecamatan	17.000.000	17.000.000	100,00

V.	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa	18.000.000	14.750.000	81,94
1	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	6.000.000	6.000.000	100,00
2	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	0	0	0
3	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12.000.000	8.750.000	72,92

VI	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	24.000.000	24.000.000	100,00
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	0	0
2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	0	0	0
3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	9.000.000	9.000.000	100,00
4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000	15.000.000	100,00

Sumber : SIMDA BKAD Kab.Tapin Tahun 2020

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
SKPD KECAMATAN HATUNGUN
TAHUN 2020**

No.	URAIAN	Rincian	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.819.827.318	1.418.865.077
2	Belanja Barang & Jasa	439.937.936	426.593.245
3	Belanja Modal	98.800.000	98.800.000
	Jumlah	2.358.565.254	1.944.258.322

Sumber : SIMDA Keuangan BKAD Kab.Tapin Tahun 2020

Sedangkan anggaran belanja langsung dianggarkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Hatungun.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

a. Permasalahan Strategis SKPD Kecamatan Hatungun

Setelah dilaksanakan identifikasi dan analisis permasalahan strategis di Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan..
4. Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.
5. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan
6. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan tahapan-tahapan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

7. Rendahnya pemahaman mengenai pengagendaan administrasi pelayanan di Kecamatan
8. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
9. Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk
10. Keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat
11. Masih terbatasnya SDM masyarakat yang mengikuti lomba MTQ/STQ
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa
13. Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat

b. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Hatungun

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Hatungun harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang Diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia
	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada table diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Hatungun dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Hatungun dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75	77,00			79,00		81,00		83,00		85,00		85,00		Kabupaten	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,23	85,00	86,00		87,00		87,00		87,00		87,00		87,00		Kecamatan	
				Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal 75	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan	
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan	

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			85,00	133.404.152	86,00	135.171.131	87,00	149.183.763	88,00	162.954.077	89,00	176.308.254	89,00	757.221.377	Kecamatan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	26.500.000	Kecamatan
			Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor			12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	Kecamatan
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	4.555.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.055.000	12	7.000.000	60	27.610.000	Kecamatan
			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman			12	8.475.000	12	8.975.000	12	9.000.000	12	9.975.000	12	10.000.000	60	46.425.000	Kecamatan
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			12	52.000.000	12	52.500.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	78.000.000	60	317.500.000	Kecamatan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	Kecamatan
			Penyediaan Operator e-KTP	Waktu Penyediaan jasa Perekaman dan			12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	120	100.000.000	Kecamatan

				Pelayanan E-KTP															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat		12	1.200.000	12	1.700.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	8.900.000	Kecamatan	
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor		12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	3.000.000	60	12.500.000	Kecamatan	
			Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional		1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	5	58.500.000	Kecamatan	
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan jasa keamanan kantor		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	Kecamatan	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80,00	20.000.000	80,00	20.500.000	80,00	22.000.000	80,00	23.000.000	80,00	25.000.000	80,00	110.500.000	Kecamatan	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12	20.000.000	12	20.500.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	25.000.000	60	110.500.000	Kecamatan	

			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			100	3.600.000	100	4.600.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	25.200.000	Kecamatan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD			13	2.600.000	13	3.100.000	13	3.500.000	13	4.000.000	13	4.000.000	65	17.200.000	Kecamatan
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			2	1.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10	8.000.000	Kecamatan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik			100	56.800.000	100	57.500.000	100	57.500.000	100	58.000.000	100	58.000.000		287.800.000	Kecamatan
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5	13.000.000	Kecamatan

			Koordinasi aparat pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi aparat pemerintahan desa		9	24.800.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	45	124.800.000	Kecamatan	
			Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi pengawasan dana desa		12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	60	110.000.000	Kecamatan	
			Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	60	40.000.000	Kecamatan	
	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di Desa		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan		100	9.000.000	100	9.500.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	50.500.000	Kecamatan	
			Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		1	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	5	50.500.000	Kecamatan	
Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial				Tingkat Pengangguran terbuka (%)														Kabupaten	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan		65,00	13.000.000	70,00	13.500.000	75	13.500.000	80	14.500.000	85	17.500.000	85	72.000.000	Kecamatan	
			Tingkat Partisipasi Keagamaan	Tingkat Partisipasi		100		100		100		100		100		100		Kecamatan	

	n Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		n dan Ekonomi Masyarakat Desa	Pelaku Usaha Kecamatan															
			Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	5	16.500.000	Kecamatan
			Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa			1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	5	13.500.000	Kecamatan
			Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan			1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	5	42.000.000	Kecamatan
								235.804.152		240.971.131		257.183.763		274.454.077		294.808.254		130.3221.377	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Program pada Kantor Kecamatan Hatungun merupakan program yang ada di RPJMD Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kantor Kecamatan Hatungun kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut dalam bentuk *Dokumen Perencanaan Tahunan*. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Hatungun. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Hatungun.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

4	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	16.566.520	0	0	Bulan	18.223.172
4	1	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	7.000.000	0	0	Bulan	7.700.000
4	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	Bulan	5.500.000
4	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuma	12 Bulan	43.500.000	0	0	Bulan	47.850.000
4	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	125.915.000	0	0	Kegiatan	138.506.500
4	1	1	30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12.000.000	0	0	Bulan	13.200.000
4	1	1	33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-Ktp	12 Bulan	24.000.000	0	0	Bulan	26.400.000
4	1	1	39	Peringatan Hari-hari Besar Nasional			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	12 Bulan	9.000.000	0	0	Bulan	9.900.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%		0	0	80	0
4	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah pengadaan tanah	1 Paket	30.000.000	0	0	Paket	33.000.000
4	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	57.500.000	0	0	Bulan	63.250.000
4	1	2	55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 Bulan	85.300.000	0	0	Bulan	93.830.000

				Kantor				Kendaraan Dinas/Operasional							
4	1	2	63	Sertifikasi Tanah			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	13.620.000	0	0	Bulan	149.820.000	
4	1	2	66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Buah	5.000.000	0	0	Buah	5.500.000	
4	1	2	68	Pembangunan Tempat Parkir Kantor			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor							
4	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%		0	0	100	0	
4	1	6	1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	3.250.000	0	0	Dokumen	3.575.000	
4	1	6	6	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2.200.000	0	0	Dokumen	2.420.000	
4	1	35		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan		Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%		0	0	100	0	

						Perangkat Daerah								
4	1	35	2	Musrenbang Kecamatan			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	17.000.000	0	0	Kegiatan	18.700.000
4	1	41		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa		Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	70% 100%		0	0	100	0
4	1	41	1	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	6.000.000	0	0	Kegiatan	6.600.000
4	1	41	3	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Pembinaan Kegiatan Keagamaan	1 Kali		0	0	Kegiatan	0

4	1	41	4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	6.000.000	0	0	Kegiatan	6.600.000
4	1	42		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan		Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%					
								Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti	100%		0	0	100	
4	1	42	1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali	0	0	0	Kegiatan	0
4	1	42	2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			KECAMATAN HATUNGUN	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	1 Kali	0	0	0	Kali	0
4	1	42	3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Pengawasan Dana Desa	12 Bulan	9.000.000	0	0	Bulan	9.900.000
4	1	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			KECAMATAN HATUNGUN	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan	15.000.000	0	0	Bulan	16.500.000
TOTAL										532.237.936	0	0		

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, perlu adanya Standar Pelayanan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya dalam melaksanakan pelayanan publik, dituntut untuk menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Hatungun antara lain sebagai berikut :

1. Pembuatan SKCK
2. Rekomendasi Pembuatan e-KTP
3. Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga
4. Pelayanan Pindah – Datang
5. Rekomendasi Akta Kelahiran
6. Pembuatan Surat Dispensasi Menikah
7. Pembuatan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM)

8. Surat Keterangan Ijin Usaha
9. Surat Keterangan Meninggal Dunia
10. Surat Keterangan Ahli Waris.

Sedangkan untuk penilaian Kecamatan Hatungun menggunakan Kuisisioner Penilaian atas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat. Menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Minimal 75 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Persyaratan
- b. Prosedur Pelayanan
- c. Ketepatan Waktu
- d. Kewajaran biaya
- e. Hasil dari Pelayanan
- f. Kemampuan petugas
- g. Kesopanan dan keramahan petugas
- h. Maklumat / Janji Pelayanan
- i. Tindak Lanjut Pengajuan

BAB II

CAPAIAN KINERJA SKPD

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Fungsi Penunjang

Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin, pada BAB II pasal 2 point 1. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 2 Point 2, 1. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Pengelolaan kesektariatan dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Indikator Kinerja Kunci

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran Kinerja, Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (Input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan Komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, Target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah Kinerja kemudian dianalisis untuk diketahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan Kinerja yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN HATUNGUN

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN	SEKRETARIS CAMAT	HASIL SURVEY
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75	$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN DENGAN IKM MINIMAL 75}}{\text{JUMLAH LAYANAN DI KECAMATAN}} \times 100 \%$		
2.	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	$\frac{\text{JUMLAH PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN}}{\text{JUMLAH PENGADUAN}} \times 100 \%$	KASI TRANTIB	LAPORAN PENGADUAN
3	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN	$\frac{\text{JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN}}{\text{JUMLAH DESA}} \times 100 \%$ Desa yang memiliki administrasi sesuai ketentuan adalah desa yang memiliki dokumen-dokumen sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa dan 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, serta perbup nomor 14 tahun 2015 tentang tatacara pengadaan barang dan jasa	KASI PEMERINTAHAN	LAPORAN

3) Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Belanja Pegawai	100%	Realisasi APBD Tahun 2020	
3	Pengadaan	Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	Realisasi APBD Tahun 2020	
4	Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar	100%	Data Nominatif PNS Kec. Hatungun tahun 2020	

4) Sumber Data

Data di ambil dari Renstra SKPD, Renja SKPD, Kuesioner Nilai point Kepuasan Masyarakat / IKM, Simda Keuangan SKPD, Data DUK ASN, Target Perjanjian Kinerja SKPD, Belanja Pegawai di Daftar Gaji dan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2017 sebagai tambahan narasi.

2.2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Visi dan Misi Kecamatan Hatungun yang termuat dalam RENSTRA Kecamatan 2018-2023, telaahan Visa dan Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang dalam membangun daerah mengacu pada visi Kepala Daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut : “ Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis” dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
- b) Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- c) Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- d) Sejahtera : Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial.

Visi Kecamatan merupakan implementasi dari visi Kabupaten yaitu “ Terwujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera “

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Misi Kecamatan Hatungun yang merupakan Implementasi Misi dari Kabupaten Tapin yaitu Point 1 dan 5.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja Kecamatan Hatungun Untuk Tahun 2020 dalam di lihat dalam tabel berikut ini :

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	100%

b. Pengukuran Capaian Kinerja di Bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point	87 point
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100 %	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	100 %	100%

c. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya (2019)

Tabel Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi / Capaian Program 2020	Target 2019	Realisasi/ Capaian Program 2019
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 point	87 point	86 point	85,39 point
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100 %	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 %	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	100 %	100%	100%	100%

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah (Renstra) 2018-2013

Sasaran 1		Meningkatnya Pelayanan Publik																		
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan		85	86	87	87,2	87,4	87,6	86,15	85,39	87	0	0	0	101,3	99,29	100	-	-	-
2	Persentase Pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75		100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100	-	-	-
	RATA-RATA		92.50	93	93,5	93.6	93.37	93.38	93,07	92,7	93,5	-	-	-	100,65	99,64	100	-	-	-

Sasaran 2		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																		
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Rentra Perubahan (2018-2023)	Target						Realisasi						Capaian %					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentasi desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan		8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	100%	100%	100%	0	0	0	100%	100%	100%	0	0	0
	RATA-RATA																			

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Kaitkan dengan Hasil yang telah di Capai

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Hatungun adalah sebagai berikut :

Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Hatungun untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Hatungun. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target yaitu di atas 80% lebih.

Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya, juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor seperti Personal Komputer/Pc masih sangat terbatas, kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Hatungun adalah sebagai berikut :

Program kegiatan tetap sama dengan program tahun sebelumnya (tahun 2019) yaitu sebanyak 6 program kegiatan meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa
5. Program pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum, kamtibmas dan organisasi kecamatan
6. Program perencanaan pembangunan kecamatan.

No.	Uraian	2020	2019
1.	Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.418.865.077,-	1.410.238.562,-

2.	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	426.593.245,-	355.368.238,-
3.	Belanja Modal	98.800.000,-	4.000.000,-
	JUMLAH	1.944.258.322,-	1.769.606.800,-

Seperti yang terlihat di tabel diatas terjadi perubahan realisasi anggaran dari Rp. 1.410.238.562,- tahun 2019 menjadi Rp. 1.418.865.077,- tahun 2020, dengan persentase realisasi tahun 2019 95,28% menjadi 82,43 % tahun 2020 atau adanya selisih sebesar 12,85%, Kecamatan Hatungun akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

Program pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan program tersebut merupakan Program dan kegiatan yang di kelola oleh Sekretariat dengan sasaran indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase aset kondisi baik, dan tertibnya administrasi keuangan SKPD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 426.593.245,- atau sebesar 96,97% dengan hasil target indikator kinerja dengan hasil indeks survey kepuasan masyarakat 100 dari nilai minimal 75 dan persentase laporan keuangan SKPD 100%, pengelolaan aset 100% terpenuhinya hasil kinerja SKPD sesuai dengan yang diinginkan dalam renja SKPD, Laporan Keuangan Triwulan dan Akhir Tahun sesuai target di perjanjian kerja dengan realisasi 100%, juga untuk laporan pengelolaan barang SKPD teradministrasi dengan baik realisasi 100%.

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa, program ini di kelola oleh seksi-seksi di Kecamatan yaitu Seksi Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.750.000,- atau sebesar 81,94% dengan sasaran indikator kinerja pengelolaan administrasi pemerintah desa, pelayanan kependudukan (KTP, surat pindah/masuk, surat keterangan tinggal,dst) tercapainya target laporan dokumen APBDes sebanyak 40 laporan dengan jumlah rekomendasi pencairan sebanyak 80 rekomendasi realisasi target capaian 100%, bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan 100%,

untuk kegiatan pembinaan kegiatan keagamaan/MTQ tidak realisasikan karena di Kabupaten tidak melaksanakan untuk tahun 2020 akibat dampak dari Covid-19.

Program pembinaan pelaksanaan pemerintahan umum, kamtibmas dan organisasi kecamatan, program ini di kelola oleh seksi Pemerintahan dan Seksi Kesra dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- atau sebesar 100% .

Program perencanaan pembangunan kecamatan program ini dikelola oleh seksi pembangunan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.000.000 atau sebesar 100% dengan indikator kinerja persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan 100% usulan telah diakomodir dan 100% jumlah surat rekomendasi IMB yang di keluarkan sesuai ketentuan.

Berdasarkan peta jabatan Peraturan Bupati Tapin No.25 Tahun 2016 selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional umum (JFU) dan fungsional tertentu (JFT). Untuk jabatan JPU berdasarkan peta jabatan minimal 19 orang dan JFT minimal 2 orang, sedangkan jabatan yang terisi untuk JFU hanya terisi sebanyak 6 JPU sedangkan yang belum terisi sebanyak 10 JPU, untuk jabatan JFT masih belum terisi. Sama dengan anggaran SKPD, sumber daya SDM di Kecamatan Hatungun juga akan dimaksimalkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Terhitung per 31 Desember 2020, dari 7 jabatan struktural ada 3 orang yang belum mengikuti diklat Pim 4 / diklat eselon 4a.

Jabatan – Jabatan JPU/JFT yang masih belum terisi yaitu :

1. Analis perencanaan dan evaluasi dan pelaporan
2. Pengadministrasi keuangan
3. Pengadministrasi umum
4. Pramu Kantor
5. Satuan Pengamanan
6. Pengadministrasi Pemerintahan
7. Pengadministrasi Kependudukan
8. Pengadministrasi Pertanahan
9. Pengelola Data keamanan dan ketertiban
10. Pengelola Pembinaan dan pengembangan perekonomian
11. Pengelola Program dan kegiatan
12. Pengerak swadaya masyarakat (JFT)

Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan se efisien mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya

merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Hatungun diukur menggunakan 4 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan, persentasi desa yang melakukan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, persentase peningkatan SKPD dengan penyerapan anggaran dan realisasi anggaran operasional barang jasa.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya penyelesaian pengaduan, meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, ini merupakan indikator kinerja utama dengan hasil yang diinginkan yaitu indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, persentase desa dengan administrasi yang baik.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran, pelayanan administrasi keuangan, merupakan indicator kinerja utama dengan hasil yang ingin dicapai persentase laporan kinerja yang tepat waktu, persentase aset dengan kondisi yang baik, dan persentase penyerapan anggaran.
3. Meningkatnya pelayanan ekonomi pedesaan merupakan indikator kinerja utama untuk meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha, persentase ijin usaha sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya pelayanan pembangunan di Kecamatan Hatungun merupakan indikator utama dengan hasil yang diinginkan persentase rekomendasi ijin IMB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan, persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan.

BAB III

PENYELENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA OLEH DESA

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 4) Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin.

2. Instansi Pemberian Tugas Pembantuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Kecamatan Hatungun, yang memberikan tugas pembantuan tersebut dari Pemerintah Pusat melalui instansi yang ada di Kabupaten Tapin yaitu :

- 1) Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
- 3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Tapin.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut adalah Camat Hatungun yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Hatungun dan berkoordinasi dengan SKPD terkait di Kabupaten Tapin selaku pemberi tugas pembantuan. Disamping itu selain bertugas sebagai koordinator, Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Hatungun.

Sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai pelaksana kegiatan di desa yang bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Hatungun adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2019 UPK Kecamatan Hatungun hanya melakukan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bergulir.
- 2) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kegiatan dari Program ini adalah kegiatan budidaya (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dan kegiatan non budidaya (industri rumah tangga, pemasaran/bakulan dan usaha lainnya yang berbasis pertanian). Pelaksanaannya di Kecamatan dikelola oleh Tim Teknis PUAP Kecamatan dan di Desa oleh dikelola Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
- 3) Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin). Kegiatan dari program ini adalah penyaluran beras rumah tangga miskin dengan harga murah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pelaksanaannya di Kecamatan dikelola oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan di desa dikelola oleh Pelaksana Distribusi Raskin di Desa. Program Raskin diterima oleh semua desa yang ada di Kecamatan Hatungun.

5. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Sumber dana dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- 1) SPP bersumber dari APBN dan APBD kabupaten Tapin
- 2) PUAP PNPM bersumber dari APBN.
- 3) Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) bersumber dari APBN. Jumlah anggaran dari program Raskin adalah berupa beras dalam jumlah ton dan kg.

6. Permasalahan Program dan Kegiatan serta Solusi

Permasalahan secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di tingkat desa adalah kurangnya memahami dalam pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah memberikan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan dalam pengelolaan administrasi kegiatan secara terus menerus.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Hatungun tahun 2020 adalah laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Hatungun Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan salah satu wahana untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang berguna untuk perbaikan kinerja di Kecamatan Hatungun pada masa yang akan datang.

5.2 Saran-saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan agar target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPMJD tahun 2018-2023 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari adanya kekurangan, untuk itu perlu adanya koreksi yang membangun untuk penyempurnaan dalam pelaporan yang lebih akuntabel dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Hatungun ini dapat menjadi bahan bagi pemerintahan Kabupaten Tapin untuk memberikan catatan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan.

Tambarangan, 15 Pebruari 2021
Camat Hatungun,

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
NIP. 19770110 199903 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)

Kecamatan Hatungun

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Hatungun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA	2.484.033.689,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.889.103.689,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.889.103.689,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	594.930.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.130.000,00
5.2.3	Belanja Modal	101.800.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.484.033.689,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	289.213.092,00	454.221.786,00	289.213.068,00	289.213.068,00	1.321.861.014,00
2.2	Belanja Langsung	442.526.520,00	23.250.000,00	104.903.480,00	11.250.000,00	581.930.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RANTAU, 2 Januari 2020

Menyetujui

Sekretaris Daerah

H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

NIP. 19650422 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

Kecamatan Hatungun

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Hatungun

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	2.484.033.689,00	2.358.565.254,00	(125.468.435,00)	(5,05)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.889.103.689,00	1.819.827.318,00	(69.276.371,00)	(3,67)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.889.103.689,00	1.819.827.318,00	(69.276.371,00)	(3,67)
5.2	BELANJA LANGSUNG	594.930.000,00	538.737.936,00	(56.192.064,00)	(9,45)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.130.000,00	439.937.936,00	(53.192.064,00)	(10,79)
5.2.3	Belanja Modal	101.800.000,00	98.800.000,00	(3.000.000,00)	(2,95)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.484.033.689,00)	(2.358.565.254,00)	125.468.435,00	(5,05)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	412.057.092,00	579.206.596,00	467.575.709,00	356.806.906,00	1.815.646.303,00
2.2	Belanja Langsung	320.025.000,00	23.500.000,00	183.212.936,00	12.000.000,00	538.737.936,00

RANTAU, 3 September 2020

Menyetujui

Sekretaris Daerah

H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

NIP. 19650422 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.01 . 4.01.14.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259.987.936,00	0,00	257.832.162,00	0,00	257.832.162,00	99,17	2.155.774,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.006.416,00	0,00	9.421.798,00	0,00	9.421.798,00	94,16	584.618,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.181.520,00	0,00	20.180.708,00	0,00	20.180.708,00	100,00	812,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	96,43	250.000,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000,00	0,00	44.913.636,00	0,00	44.913.636,00	99,81	86.364,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	104.000.000,00	0,00	102.766.020,00	0,00	102.766.020,00	98,81	1.233.980,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.30	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.33	Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 01.39	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.300.000,00	0,00	107.561.083,00	98.800.000,00	206.361.083,00	96,30	7.938.917,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.000.000,00	0,00	36.999.273,00	0,00	36.999.273,00	100,00	727,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67.000.000,00	0,00	65.561.810,00	0,00	65.561.810,00	97,85	1.438.190,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.55	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.800.000,00	0,00	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.63	Sertifikasi Tanah	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.66	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 02.68	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 06.01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 06.06	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 35.02	Musrenbang Kecamatan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	18.000.000,00	0,00	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	81,94	3.250.000,00
4.01 . 4.01.14.01 . 41.01	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 41.03	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 41.04	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12.000.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	72,92	3.250.000,00
4.01 . 4.01.14.01 . 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.01 . 4.01.14.01 . 42.01	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 42.02	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 42.03	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4.01.14.01 . 42.04	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		538.737.936,00	0,00	426.593.245,00	98.800.000,00	525.393.245,00	97,52	13.344.691,00

RANTAU, 31 Desember 2020

Kepala SKPD

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM

NIP. 19770110 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Hatungun

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	2.358.565.254,00	1.944.258.322,00	82,43	1.769.606.800,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.259.765.254,00	1.845.458.322,00	81,67	1.765.606.800,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.819.827.318,00	1.418.865.077,00	77,97	1.410.238.562,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.937.936,00	426.593.245,00	96,97	355.368.238,00
5 . 2	BELANJA MODAL	98.800.000,00	98.800.000,00	100,00	4.000.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.800.000,00	98.800.000,00	100,00	4.000.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.358.565.254,00)	(1.944.258.322,00)	82,43	(1.769.606.800,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.358.565.254,00)	(1.944.258.322,00)	82,43	(1.769.606.800,00)

RANTAU, 31 Desember 2020

Kepala SKPD

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM

NIP. 19770110 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Hatungun
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Hatungun
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
Bendahara Pengeluaran : MUJI ANAN
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	943.642.915,00	653.562.026,00	37.081.800,00	690.643.826,00	690.643.826,00	252.999.089,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	113.978.679,00	79.592.190,00	4.694.482,00	84.286.672,00	84.286.672,00	29.692.007,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	67.050.000,00	3.860.000,00	70.910.000,00	70.910.000,00	11.970.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.230.000,00	15.775.000,00	1.085.000,00	16.860.000,00	16.860.000,00	3.370.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	64.910.046,00	37.368.720,00	2.679.540,00	40.048.260,00	40.048.260,00	24.861.786,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.285.678,00	2.684.782,00	21.617,00	2.706.399,00	2.706.399,00	1.579.279,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	9.525,00 0,00 0,00	395,00 0,00 0,00	9.920,00 0,00 0,00	9.920,00	990.080,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	588.900.000,00	0,00 440.800.000,00 0,00	0,00 72.600.000,00 0,00	0,00 513.400.000,00 0,00	513.400.000,00	75.500.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.181.520,00	0,00 0,00 19.910.708,00	0,00 0,00 270.000,00	0,00 0,00 20.180.708,00	20.180.708,00	812,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5.000.000,00	0,00 0,00 2.150.000,00	0,00 0,00 2.850.000,00	0,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00 0,00 1.800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	0,00 0,00 9.144.000,00	0,00 0,00 6.856.000,00	0,00 0,00 16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.999.273,00	727,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.999.273,00	0,00	29.999.273,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja perlengkapan hari-hari besar/tertentu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.801.400,00	398.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.615.900,00	185.500,00	1.801.400,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.686.416,00	0,00	0,00	0,00	7.500.398,00	186.018,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.293.398,00	207.000,00	7.500.398,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			120.000,00	0,00	120.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan/Instalasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengolahan Data	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Kebersihan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Keamanan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Jasa Pengawasan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja Jasa Tukang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	670.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.830.000,00	500.000,00	9.330.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.980.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.980.000,00	0,00	24.980.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.971.310,00	28.690,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.971.310,00	0,00	29.971.310,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.500,00	719.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.280.500,00	0,00	1.280.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.100.000,00	0,00	8.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.913.636,00	86.364,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.313.636,00	4.600.000,00	44.913.636,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	3.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.100.000,00	0,00	17.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.750.000,00	0,00	8.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.085.000,00	915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.785.000,00	(700.000,00)	24.085.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	78.681.020,00	318.980,00
			0,00	0,00	0,00		
			67.701.020,00	10.980.000,00	78.681.020,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH	2.358.565.254,00	856.042.243,00	49.422.834,00	905.465.077,00	1.944.258.322,00	414.306.932,00
			562.600.000,00	83.600.000,00	646.200.000,00		
			358.344.745,00	34.248.500,00	392.593.245,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Penerimaan							
-	SP2D	1.950.123.122,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 22	2.695.328,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 23	1.016.818,00					
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.365.634,00					
-	Lain-lain	0,00					
	Jumlah Penerimaan	<u>1.963.200.902,00</u>					
Pengeluaran							
-	SPJ (LS + UP/GU/TU)	1.950.071.622,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 22	2.695.328,00					
-	Pajak Penghasilan Ps 23	1.016.818,00					
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.365.634,00					
-	Lain-lain	51.500,00					
	Jumlah Pengeluaran	<u>1.963.200.902,00</u>					
	Saldo Kas	<u>0,00</u>					
RANTAU, 31 Desember 2020 BENDAHARA PENGELUARAN							
<hr/> MUJI ANAN NIP. 19810903 201001 1 009							